

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

RENCANA KERJA

TAHUN 2026

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SERUYAN**



TAHUN 2025



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2/ 304 /2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026**

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sehubungan telah diundangkannya Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, perlu dilakukan penyesuaian pada rencana kerja perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Kerja Kabupaten Seruyan Tahun 2026;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 120);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 79), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
15. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 21).

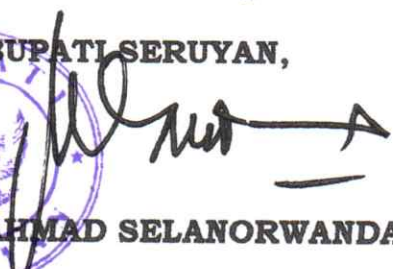
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026;
- KETIGA** : Sistematisa penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** yaitu sebagai berikut:
- BAB I : PENDAHULUAN;
 - BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - BAB V : PENUTUP.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 29 Juli 2025

 **BUPATI SERUYAN,**

AHMAD SELANORWANDA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2/ 304 /2025
TANGGAL 29 Juli 2025
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
1	Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan
5	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seruyan
8	Dinas Sosial Kabupaten Seruyan
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan
15	Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan
21	Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan
22	Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan
26	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seruyan
28	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
30	Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan
31	Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan
32	Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan
33	Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan
34	Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan
35	Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan
36	Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan
37	Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan
38	Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan
39	Kecamatan Suling Tambun Kabupaten Seruyan



BUPATI SERUYAN,

AHMAD SELANORWANDA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim, Alhamdulillahirrobbil'alamin, Puji Syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan Tahun 2026 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan ini disusun sebagai Dokumen Resmi yang berisikan Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan Tahun 2026.

Demikian Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan Tahun 2026 disusun dengan harapan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada masa yang akan datang maupun pada tahun-tahun sebelumnya. Semoga renja perubahan anggaran ini dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi Pimpinan dan seluruh staf pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan di tahun mendatang.

Kuala Pembuang,

Juli 2025


Kepala Dinas P3AP2KB
Kabupaten Seruyan
JUNAIDI, S.I.P.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19670712 198911 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	2
1.3 Landasan Hukum	12
1.4 Maksud dan Tujuan	15
1.5 Sistemetika Penulisan	16
BAB III HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	18
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	18
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	41
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	44
2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD	46
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	57
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	58
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	58
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	60
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	71
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DP3AP2KB KABUPATEN SERUYAN	77
BAB V PENUTUP	100

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Evaluasi Kinerja Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun berjalan Kabupaten Seruyan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan Per 31 Desember 2024.....	19
Tabel 2 Realisasi Keuangan DP3AP2KB Kabupaten Seruyan Tahun 2024.....	39
Tabel 3 Laporan Realisasi Anggaran Per Belanja Per 31 Desember 2023.....	40
Tabel 4 Capaian Indikator Kinerja Utama DP3AP2KB Kabupaten Seruyan Tahun 2024.....	42
Tabel 5 Capaian Indikator Kinerja Program DP3AP2KB Kabupaten Seruyan Tahun 2024.....	43
Tabel 6 Permasalahan Yang Dihadapi.....	45
Tabel 7 Review Terhadap Rancangan Akhir Rkpd Kabupaten Seruyan Tahun 2026.	47
Tabel 8 Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat.....	57
Tabel 9 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025.....	57
Tabel 10 Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026.....	71
Tabel 11 Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026.....	73
Tabel 12 Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Prioritas Kabupaten Seruyan Tahun 2026.....	75
Tabel 13 Rencana Kerja dan Pendanaan	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk dasar penyusunan dokumen rencana kerja perangkat daerah, yaitu dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah perangkat daerah.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan Tahun 2026 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Di sisi yang lain, Rencana Kerja Perangkat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan Tahun 2026 ini menjadi dasar Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Seruyan Tahun 2026, serta dasar penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LKjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2022, sebagai berikut :

A. Tugas dan Fungsi

- Unit : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Kerja Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
- Tugas : Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- Fungsi : a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (Pug) Pada Lembaga Pemerintah;
b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan;
c. Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
d. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah;
e. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi;
f. Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah;
g. Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (Kg) Dan Hak Anak Tingkat Daerah;

- h. Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kg Dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah;
- i. Penyediaan Layanan Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan Kg Dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah;
- j. Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah;
- k. Pelembagaan Pha Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Dan Dunia Usaha;
- l. Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
- m. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah;
- n. Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah; Dan
- o. Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah.

1. Kepala Dinas

Tugas : Memimpin, Membina, Merencanakan, Mengoordinasikan, Menetapkan Serta Menyelenggarakan Program Kerja, Tata Kerja Dan Mengembangkan Semua Kegiatan Dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Serta Bertanggung Jawab Atas Terlaksananya Tugas Dan Fungsi Dinas.

- Fungsi :
- a. Perumusan Dan Penetapan Rencana Kebijakan Program Dan Kegiatan Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Dinas;
 - b. Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Sekretariat, Bidang, UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional Dan Pelaksana Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Dinas;
 - c. Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Program Dan Kegiatan Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Dinas;
 - d. Penilaian Dan Pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai Dan Prestasi Kerja Bawahan; Dan
 - e. Pelaksanaan Tugas Lainnya Yang Diperintahkan Oleh Pimpinan.

2. Sekretaris

Tugas : Mengoordinasikan Penyusunan Perencanaan Dan Pelaporan, Keuangan, Kepegawaian, Dan Barang Milik Daerah Pada Dinas Serta Memberikan Pelayanan Administratif Dan Teknis Kepada Semua Unsur Di Lingkungan Dinas.

- Fungsi :
- a. Perumusan Dan Perencanaan kegiatan Program Kerja Sekretariat;
 - b. Pengoordinasian Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Dinas
 - c. Pengoordinasian Administrasi Keuangan Dinas
 - d. Pengoordinasian Administrasi Barang Milik Daerah Dinas
 - e. Pengoordinasian Administrasi Kepegawaian Dinas
 - f. Pengoordinasian Administrasi Umum Dinas
 - g. Pengoordinasian Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas;

- h. Pengoordinasian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Dinas
- i. Pengoordinasian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas
- j. Penilaian Dan Pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai Dan Prestasi Kerja Bawahan; Dan
- k. Pelaksanaan Tugas Lainnya Yang Diperintahkan Oleh Pimpinan

- **Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan**

Subbagian Penyusunan Program Dan Keuangan Dipimpin Oleh Kepala Subbagian Yang Berkedudukan Dibawah Dan Bertanggung Jawab Kepada Sekretaris Dinas.

- Tugas :
- a. Merumuskan Dan Merencanakan Kegiatan Program Kerja Pada Subbagian Penyusunan Program Dan Keuangan
 - b. Melaksanakan Pengoordinasian Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas;
 - c. Melaksanakan Pengoordinasian Dan Menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran Dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran Dinas;
 - d. Melaksanakan Pengoordinasian Dan Menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran/ Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Dinas
 - e. Melaksanakan Pengoordinasian Dan Menyusun Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas;
 - f. Menyiapkan Bahan Evaluasi Kinerja Dinas;
 - g. Melaksanakan Administrasi Keuangan Dinas;
 - h. Menilai Dan Mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai Dan Prestasi Kerja Bawahan

- i. Melaksanakan Tugas Lainnya Yang Diperintahkan Oleh Pimpinan

- **Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian**

Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

- Tugas :
- a merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
 - b melaksanakan Administrasi Umum Dinas
 - c melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas
 - d melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas
 - e melaksanakan Administrasi Kepegawaian Dinas
 - f menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan
 - g melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

2. **Bidang PUG, Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga**

Tugas : merumuskan kebijakan teknis dan operasional program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga

Fungs : a. perumusan rencana program dan kegiatan dibidang PUG, Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga;

- b. perumusan dan Mensosialisasikan Pelaksanaan Pelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten;
- c. pelaksanaan sosialisasi dan Mengkoordinasikan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten;
- d. pengoordinasian Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten;
- e. pelaksanaan sosialisasi Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten;
- f. pengoordinasian dan mensosialisasikan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten;
- g. pengoordinasian dan Mensosialisasikan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten;
- h. pengoordinasian Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten;
- i. pelaksanaan sosialisasi dan perumusan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten;
- j. perumusan dan pengoordinasian Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan

Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten;

- k. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

3. Bidang Pengelolaan Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak

Tugas : Mengelola Sistem Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak

- Fungsi :
- a. Perumusan rencana program dan kegiatan dibidang Pengelolaan Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - b. perumusan dan mengkoordinasikan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten;
 - c. pengoordinasian pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten;
 - d. pelaksanaan sosialisasi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten;
 - e. perumusan dan mensosialisasikan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten;
 - f. pengoordinasian Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten;

- g. pengoordinasian Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten;
- h. perumusan dan mengoordinasikan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten;
- i. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan;
pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

4. **Bidang Pengendalian Penduduk dan Pembinaan Keluarga Berencana**

Tugas : Pemaduan dan Sinkronisasi Program Pengendalian Penduduk, Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB dan Pendayagunaan Tenaga PKB dan PLKB dalam upaya mewujudkan Program K.

- Fungsi :
- a. perumusan rencana program dan kegiatan dibidang Pengendalian Penduduk dan Pembinaan KB
 - b. pengoordinasian dan mensosialisasikan Pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk;
 - c. perumusan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten;
 - d. pengoordinasian dan mensosialisasikan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal;

- e. pengoordinasian Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB);
- f. penyeliaan dan Memeriksa Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten;
- g. pengoordinasian dan mensosialisasikan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
- h. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

5. Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Tugas : Melaksanakan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan Keluarga, Advokasi, KIE Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan

Fungsi :

- a. perumusan rencana program dan kegiatan dibidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera;
- b. perumusan, mensosialisasikan, dan Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. perumuskan, mensosialisasikan dan mengkoordinasikan Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga

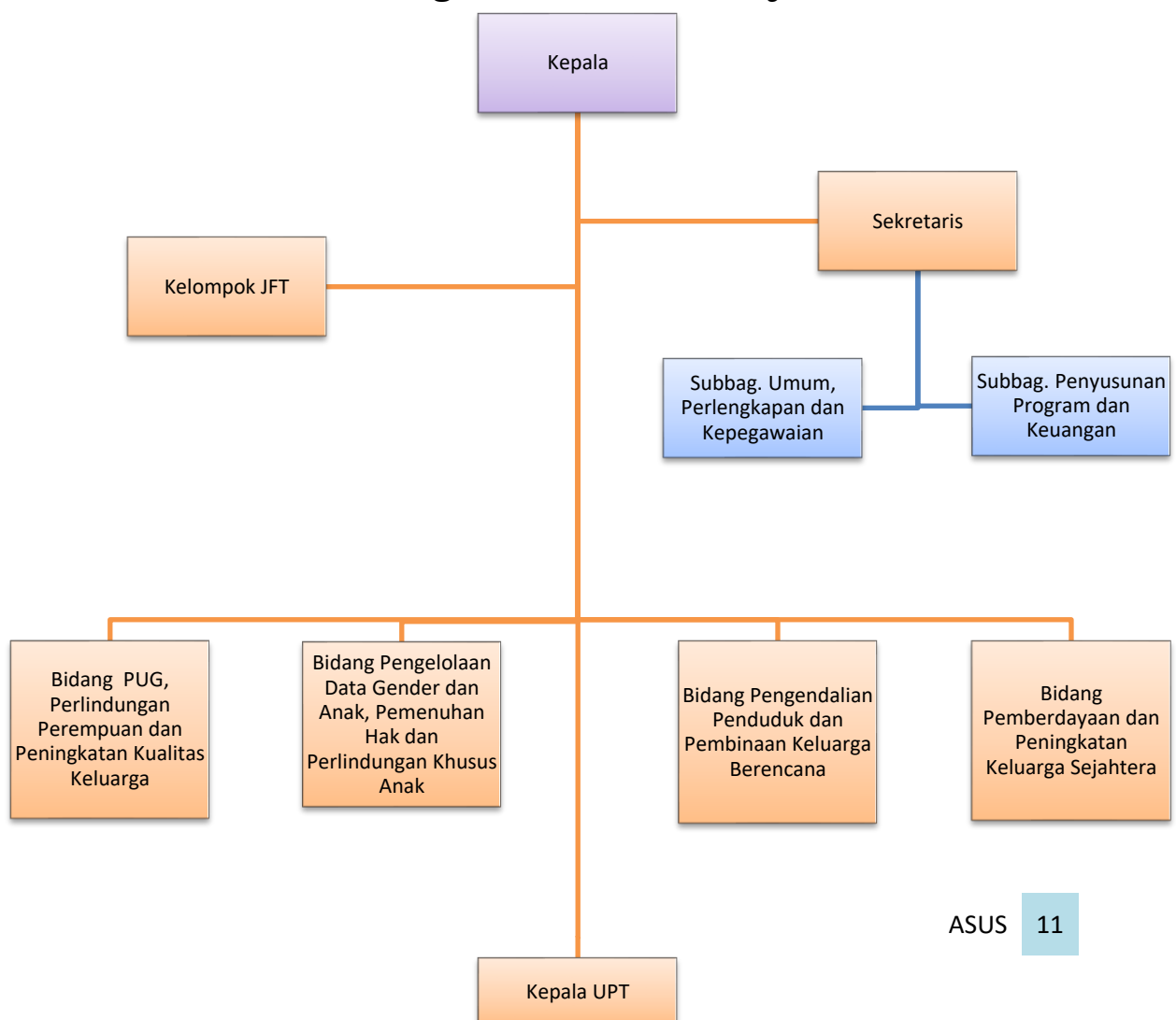
Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

- d. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

A. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Seruyan Nomor 21 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan, Stuktur Organisasi dan Tata Kerja DP3AP2KB Kabupaten Seruyan sebagai berikut :

Struktur Organisasi dan Tata Kerja



- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris Dinas;
 - Sub Bagian Penyusunan Program Dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
- c. Kepala Bidang PUG, Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga
- d. Kepala Bidang Pengelolaan Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Pembinaan Keluarga Berencana
- f. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

1.3 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan Tahun 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, KabupatenPulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Negara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Noor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 120);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan Tahun 2026 untuk memastikan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah memuat Indikator, Target Kinerja, Kelompok Sasaran, Lokasi dan Pagu Indikatif serta prakiraan maju dan mendukung program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 untuk memberikan arah dalam membuat rumusan dan menyusun rencana kegiatan dan menentukan anggaran yang diperlukan.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan Tahun 2026 tersusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Akhir Renja

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan Tahun 2024 dan Capaian Renstra.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. dan urusan pemerintah bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2026 diperlukan adanya Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi

Adapun hasil evaluasi Rencana Kerja per 31 Desember 2024 Pagu Anggaran Rp. 13.416.526.757,00 dengan Realisasi per 31 Desember 2024 Rp. 11.648.867.935,74 atau 86,82%, yang dialokasikan untuk 10 Program, 25 Kegiatan dan 56 Sub Kegiatan.

Tabel 1
Evaluasi Kinerja Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun berjalan Kabupaten Seruyan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Seruyan Per 31 Desember 2024

6	Sasaran	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada per Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	Tersedianya Penunjang urusan Pemerintah an Daerah Kab/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan Sub administrasi perkantoran		100	23.573.6 63. 324			10 0	8.792.70 1. 140	25	834.638. 842	252	3.090.37 4. 018	25	2.456.40 1. 300	25	2.400.51 2.600	100	7.917.04 3. 990	100	7.917.043. 990	100	100	Sekretariat
		Kegiatan Perencanaan, Pen anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan		4-	150.000. 000			10	56.905. 000				-		-	10	55.900.0 00	20	13.550.0 00	20	6.752. 000	20	20	Sekretariat
		Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan		20	25.000. 000			5	28.905. 000				-			5	27.900.0 00	10	27.900.0 00	10	6.752. 000	10	10	Sekretariat
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		20	125.000. 000			5	28.905. 000		-		-		-	5	28.000.0 00	10	28.000.0 00	10	28.000. 000	10	10	Sekretariat
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan perangkat daerah		100	13.762.5 02. 613			10 0	6.099.23 . 791	25	1.488.28 . 214	25	1.153.76 . 595	25	1.115.54 6.000	25	1.000.24 5.606	100	4.360.39 1. 816	100	2.153.766. 595	100	100	Sekretariat
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji	Jumlah Orang yang Menerima		100	13.243.0 02. 613			35	5.820.04 0. 612	35	1.485.28 8. 514	35	1.485.28 8. 514	35	1.485.28 8. 514	35	1.485.28 8. 514	99	5.820.04 0. 000	99	5.820.040. 000	100	100	Sekretariat

6	Sasaran	Program Kaegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada per Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
		dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN																						
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			340.000. 000				224.184. 000	20	50.000. 000	30	70.728. 000	25	70.700. 000	25	70.700. 000	98	221.728. 000	98	221.728. 000	98	98	Sekretariat
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		100	60.000. 000			100	25.271. 000	24	5.997. 000	68	15.997. 000	20	4.200.00 0	-	-	99	25.400. 000	99	25.400. 000	99	99	Sekretariat
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah		100	708.000. 000			100	102.023. 000		-	48	41.249. 760				72.000. 000		21.249. 760	23	21.249. 760	23	23	Sekretariat
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		100	204.000. 000			100	33.000. 000							100	33.000. 000	100	33.000. 000	100	33.000. 000	100	100	Sekretariat
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		100	304.000. 000			5	69.023. 000		-	2	30.000. 000			3	39.000. 000	5	59.000. 000	5	59.000. 000	100	100	Sekretariat
		Sub. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100	150.000. 000			10	33.700. 100		-	3	11.249. 000-	7	22.000. 000	-	-	10	33.249. 000	10	33.249. 000	100	100	Sekretariat

6	Sasaran	Program Kaegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada per Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
																									Triwulan I
											1	2	3	4	5			6							7
				K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah		100	1.123.254.268			100	484.545.950	25	169.128.300	25	113.299.200	25	2			13.299.200	9,2	13.299.200	9,2	9,2	Sekretariat	
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		100	45.000.000			10	8.269.700		-	5	4.050.100		-	5	4.050.100	10	8.100.200	10	8.100.200	100	100	Sekretariat
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100	284.000.000			10	66.663.550	2	8.748.000	5	24.874.000	2	18.000.000	2	16.455.890	10	66.540.200	10	66.540.200	98	98	Sekretariat
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		100	54.000.000			8	14.500.600		-	2	4.178.000	3	6.650.000	3	3.540.600	8	14.178.000	8	14.178.000	98	Sekretariat	Sekretariat
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		100	132.000.000			5	57.455.000		-		-	2	24.000.000	3	33.000.000	5	57.000.000	5	57.000.000	99	Sekretariat	Sekretariat
		Sub Kegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		100	65.000.000			2	15.850.000		-	1	4.442.000			1	10.000.000	2	14.442.000	100	14.442.000	100	100	Sekretariat
		Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		100	55.000.000			2	14.237.100		-	1	6.135.000			1	7.120.430	2	14.135.000	100	14.135.000	100	100	Sekretariat
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100	488.254.268			100	307.570.000	15	60.380.300	30	97.670.200	25	80.200.000	20	120.000.000	99	307.170.200	99	307.170.200	100	100	Sekretariat

6	Sasaran	Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada per Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyedia jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100		5.643.95 5. 592			100	1.680.21 3. 602	25	614.458. 328	25	635.979. 463	25	635.900. 000	25	635.100. 000	100	1.200.21 3. 000	100	1.200.213. 000	100	100	Sekretariat
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100		38.600. 000			200	8.360. 000	-	-	100	4.100. 000	-	-	100	4.100. 000	100	8.200. 000	100	8.200. 000	100	100	Sekretariat
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100		405.355. 592			12	111.747. 000	14	24.642. 000	4	24.642. 000	4	24.642. 000	4	24.642. 000	12	100.642. 000	12	100.642. 000	100	100	Sekretariat
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100		5.200.00 0. 000			12	1.506.10 6. 602	3	328.165. 400	3	328.165. 400	3	328.165. 400	3	328.165. 400	100	1.200.74 9. 000	100	1.200.749. 000	50	50	Sekretariat
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang diperlihara	100		1.684.50 2. 000			20	350.770. 297		22.766. 000		42.327. 000		-		-		42.327. 000	40	42.327. 000	40	40	Sekretariat
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100		116.250. 000			1	38.990. 000		15.690. 00		24.947. 000						24.947. 000		24.947. 000			Sekretariat
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau			398.252. 000			1	44.460. 000		6.631. 000		14.425. 000						14.425. 000	25	14.425. 000	25	25	Sekretariat

6	Sasaran	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada per Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
		Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		100																				
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100	180.000.000			20	22.950.000		445.000		2.955.000		-	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20	Sekretariat
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		100	550.000.000			1	244.370.297		-		--		-	1	244.370.297	1	244.370.297	1	244.370.297	1	1	Sekretariat
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		100	380.000.000				-				-						-		-			Sekretariat
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah tanah yang dipelihara			60.000.000				-															
2	Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD			2.070.000.000				800.000.000		-		300.000.000					300.000.000	50	300.000.000	50	50	50	Bidang PUG Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga
		Kegiatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah	Prosentase Peran serta lembaga Pemerintah		100	145.000.000			100	50.000.000		-		-	100	50.000.000		100	50.000.000	100	50.000.000	100	100	100	Bidang PUG Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga

6	Sasaran	Program Kaegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada per Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
																									Triwulan I		Triwulan II
											1	2	3	4	5			6							7		8
				K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
		Kewenangan Kabupaten/ Kota																									
		Sub Kegiatan Advokasi Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Advokasi Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota		100	45.000. 000			1	14.036. 000		-		--	1	14.036. 000			1	14.036. 000	1	14.036. 000	100	100			Bidang PUG Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga
		Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG.	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota		100	100.000. 000			1	35.964. 000		-		-	1	35.964. 000			1	35.964. 000	1	35.964. 000	100	100			Bidang PUG Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga
		Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politlik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota.	Prosentase Organisasi Masyarakat yang ikut serta Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi		100	1.800.00 0. 000			100	750.000. 000		-	30	150.000. 000	30	150.000. 000	40	450.000. 000	100	750.000. 000	100	750.000.00 0	100	100			Bidang PUG, Perlindungan n Pemerempu an dan Peningkata n Kualitas
		Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial		100	1.800.00 0. 000			100	750.000. 000			30	150.000. 000	30	150.000. 000	40	450.000. 000	100	750.000. 000	100	750.000.00 0	100	100			Bidang PUG, Perlindungan n Pemerempu an dan Peningkatan Kualitas

6	Sasaran	Program Kaegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada per Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
																										Triwulan I	
											1	2	3	4	5			6								7	
				K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
			dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota																								
		Pengutaman dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengutaan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		100	125.000. 000			1	25.000.0 00		-	1	25.000.0 00					1	25.000.0 00	1	25.000.00 0	100	100			Bidang PUG, Perlindunga n Pemerempu an dan Peningkatan Kualitas
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		100	40.000. 000			1	20.000. 000			1	20.000. 000					1	20.000. 000	1	20.000. 000	100	100			Bidang PUG, Perlindunga n Pemerempu an dan Peningkatan Kualitas
		Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota		100	15.000. 000			1	15.000. 000		-	1	15.000. 000					1	15.000. 000	1	15.000. 000	100	100			Bidang PUG, Perlindunga n Pemerempu an dan Peningkatan Kualitas
		Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota		100	70.000. 000			2	30.000. 000-			1	15.000. 000-			1	15. 000 . 000 -	2	30.000. 000-	2	30.000. 000-	2	2			Bidang PUG, Perlindunga n Pemerempu an dan Peningkatan Kualitas Keluargan

6	Sasaran	Program Kaegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada per Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
3	Meningkatnya Penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Yang Dilindungi		100	174.000.000			100	60.000.000		-	40	25.600.000	30	21.750.000	27	15.675.000	98	59.775.000	98	59.775.	98	98	UPT PPA
		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100	132.000.000			100	40.000.000		-	20	5.450.000	40	12.680.000		30.600.000	90	57.450.000	90	57.450.000	90	90	UPT PPA
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasana Kewenangan Kabupaten/Kota		100	132.000.000			100	40.000.000		-	20	5.450.000	40	12.680.000		30.600.000	90	57.450.000	90	57.450.000	90	90	UPT PPA
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100	42.000.000			2	15.000.000		-		-	2	15.000.000			2	15.000.000	2	15.000.000	2	2	UPT PPA
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga	Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga		100	42.000.000			2	15.000.000		-		-	2	15.000.000			2	15.000.000	2	15.000.000	2	2	UPT PPA

6	Sasaran	Program Kaegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada per Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
																										Triwulan I	
											1	2	3	4	5			6								7	
				K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
		Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota																								
4	Meningkatk an pemenuhan kebutuhan dasar anggota keluarga	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Legalitas Keutuhan Dan Kesetaraan Gender		100	105.000. 000			10 0	50.027.4 00		-	1	18.591. 400	2	31.436. 000			100	50.027.4 00	100	50.027.40 0	100	100			Bidang PUG, Perlindunga n Pemerempu an dan Peningkatan Kualitas Keluargan
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase pelaksanaan KIE pada keluarga di sepuluh kecamatan		100	105.000. 000			10 0	50.027. 400		-	1	18.591. 400	2	31.436. 000				12.415. 400	8	12.415. 400	8	8			Bidang PUG, Perlindunga n Pemerempu an dan Peningkatan Kualitas Keluargan
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota.	Jumlah Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota.		100	24.000. 000			2	31.436. 000		-		-	2	31.436. 000			2	31.436. 000	2	31.436. 000	2	2			Bidang PUG, Perlindunga n Pemerempu an dan Peningkatan Kualitas Keluargan
		Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat Untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota..	Jumlah Pengembangan Kegiatan Masyarakat Untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota.		100	81.000. 000			1	18.591. 400		-	1	18.591. 400					1	18.591. 400	1	18.591. 400	100	100			Bidang PUG, Perlindunga n Pemerempu an dan Peningkatan Kualitas Keluargan

6	Sasaran	Program Kaegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada per Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
5	Tersedianya data jumlah Anak berdasarkan jenis kelamin dan usia	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dokumen Hasil Pengolahan Data Gender dan Anak		100	30.000.000			1	30.000.000		-	1	15.000.000-	1	15.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	100	100	-Bidang Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak
		Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Tersedianya Data Analisis Gender dan Anak		100	30.000.000			1	30.000.000		-	1	15.000.000-	1	15.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	100	100	-Bidang Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak
		Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota		100	30.000.000			1	30.000.000		-	1	15.000.000-	1	15.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	100	100	-Bidang Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak
6	Meningkatnya Lembaga Penyedia Layanan PHA terhadap Anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Kabupaten Layak Anak (KLA)		300	570.000.000			100	280.000.000	35	50.000.000	30	40.000.000	30	40.000.000	3	140.000.000	100	280.000.000	100	280.000.000	100	100	-Bidang Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak
		Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	Tersedianya Lembaga Pemenuhan Hak Anak		2	570.000.000			35	50.000.000	35	50.000.000	30	40.000.000			3	140.000.000	3	140.000.000	3	3	35	50.000.000	-Bidang Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak dan Perlindungan

6	Sasaran	Program Kaegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada per Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
																								Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III
											1	2	3	4	5			6						7		8		9
				K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			n Khusus Anak	
		Kewenangan Kabupaten/Kota																										
		Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha		3	570.000. 000				3	140.000. 000	35	50.000. 000	35	50.000. 000	30	40.000. 000		3	140.000. 000	3	140.000. 000	3	3			-Bidang Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak dan Perlindunga n Khusus Anak	
7	Menurunkan tingkat Anak rawan kekerasaan	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani		100	120.000. 000				10 0	179.963. 200		-	27	25.769. 500	10	4.050.76 0	30	5.600.75 0	80	60.174.3 50	80	60.174.35 0	80	80			-Bidang Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak dan Perlindunga n Khusus Anak
		Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya kerjasama antara pemerintah dan non pemerintah dalam rangka upaya penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak		100	15.000. 000				1	15.000. 000		-		1	15. 000 000			1	15.000. 000	1	15.000. 000	1	1			-Bidang Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak dan Perlindunga n Khusus Anak	
		Sub Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Kebijakan/Progra m/Kegiatan Pencegahan	Jumlah Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Kebijakan/Progra m/Kegiatan Pencegahan		1	15.000. 000				1	15.000. 000		-		1	15. 000 000			1	15.000. 000	1	15.000. 000	1	1			-Bidang Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak dan Perlindunga n Khusus Anak	

6	Sasaran	Program Kaegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada per Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
		Kekerasan Terhadap Anak	Kekerasan Terhadap Anak																						
		Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan pengaduan apabila terjadi kekerasan terhadap anak		100	60.000.000			100	39.970.750		-	10	9.800.800	40	15.600.000	30	2.340.000	92	38.760.000	92	38.760.000	92	92	-Bidang Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak
		Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK		4	60.000.000			4	39.970.750		-	1	9.800.800	2	15.600.000	1	2.340.000	42	38.760.000	4	38.760.000	4	4	-Bidang Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak
		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		5	45.000.000			5	69.999.450		-	3	15.968.700	2	21.450.000				15.968.700	35	15.968.700	35	35	-Bidang Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak
		Sub Kegiatan Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota		5	15.000.000			5	29.999.750		-	3	15.968.700	2	21.450.000		-	94	15.968.700	94	15.968.700	94	94	-Bidang Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak
		Sub Kegiatan Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak	Jumlah Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak		1	30.000.000			1	39.999.700		-	1	15.968.700						15.968.700	40	15.968.700	40	40	-Bidang Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak dan Perlindungan

6	Sasaran	Program Kaegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada per Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
		tingkat daerah kabupaten/kota	tingkat daerah kabupaten/kota																						n Khusus Anak
8	Meningkatk an Kualitas Keluarga	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan Kebijakan Daerah Pemetaan Perkiraan Profil/Karakteris tik	100		328.900. 000			10 0	60.000. 000	-	-					100	60.000. 000	100	60.000. 000	100	60.000. 000	100	100	Bidang Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana
		Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) per WUS (15-49 tahun);	2,1		91.000. 000			2,1	30.000. 000	-	-					1	30.000. 000	1	30.000. 000	1	30.000. 000	2,1	2,1	Bidang Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana
		Sub Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1		91.000. 000			1	30.000. 000	-	-					1	30.000. 000	1	30.000. 000	1	30.000. 000	1	1	Bidang Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana
		Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	10		100.000. 000			1	75.000. 000	-	-	1	75.000. 000				1	75.000. 000	1	75.000. 000	1	1	1	Bidang Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana
		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1		20.000. 000			1	25.000. 000	-	-	1	25.000. 000				1	25.000. 000	1	25.000. 000	1	1	1	Bidang Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana
		Sub Kegiatan Pengolahan dan	Jumlah Dokumen	1		20.000. 000			1	50.000. 000	-	-	1	50.000. 000				1	50.000. 000	1	50.000. 000	1	1	1	Bidang Pengendalia

6	Sasaran	Program Kaegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada per Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
		Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																						n Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Meningkatnya Akseptor KB	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Peserta KB aktif untuk Pasangan Usia Subur (PUS)	100		1.374.152.000			100	2.052.175.000	25	513.400.000	25	513.400.000	25	513.400.000	25	513.400.000	80	2.052.000.000	80	2.052.000.000	100	100	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern/(Modern Contraceptive Prevalence Rate / mPCR);	100		800.000.000			100	706.000.000	25	170.000.000	25	170.000.000	25	170.000.000	25	170.000.000	90	680.000.000	90	680.000.000	100	100	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	100		100.000.000			100	100.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK dan Elektronik serta Media Luar Ruang	12		100.000.000			12	60.000.000		-	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	12	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan,	10		100.000.000			4	496.000.000		-	1	121.000.000			32	300.400.000	90	421.000.000	90	421.000.000	4	4	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

6	Sasaran	Program Kaegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada per Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Triwulan I				Triwulan II										
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
			dan Keluarga Berencana)																						
		Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang .	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	20		100.000.000			4	150.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	90	140.000.000	90	140.000.000	20	20	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	112		100.000.000			112	400.000.000	112	100.000.000	112	100.000.000	112	100.000.000	112	100.000.000	112	400.000.000	112	400.000.000	100	100	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	100		50.000.000			100	300.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	100	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	100		50.000.000			4	100.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	4	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

6	Sasaran	Program Kaegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada per Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
																										Triwulan I	
											1	2	3	4	5			6								7	
				K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
		Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokuemn Hasil Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		100	50.000.000			12	150.425.000	3	25.000.000	6	55.400.000	1	25.000.	2	30.000.000	90	130.000000	s	130.000000	40	40			Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		100	50.000.000			1	23.400.000		-	1	23.400.000				1.200.000	40	1.200.000	40	40					Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB		100	80.000.000			6	60.125.000		-	3	30.000.000			3	30.000.000	6	60.000.000	6	60.000.000	6	6			Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			100.000.000			6	51.900.000	3	25.000.000		-	3.	25.000.		50.000.000-	6	50.000.000-	6	50.000.000-	6	6			Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan dan Peningkatan		100	125.000.000			12	795.750.000	4	198.750.000	4	198.750.000	4	198.750.000	4	198.750.000	12	795.750.000	12	795.750.000	100	100			Bidang Pengendalian Penduduk dan

6	Sasaran	Program Kaegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada per Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
																										Triwulan I	
											1	2	3	4	5			6								7	
				K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
		Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB																								Keluarga Berencana
		Sub Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		100	50.000. 000			4	225.750. 000	1	55.000. 000	1	55.000. 000	1	55.000. 000	1	55.000. 000	4	220.000. 000	4	220.000. 000	99	99			Bidang Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	umlah DASHAT di Kampung KB		100	75.000. 000			97	570.000. 000	97	142.500. 000	97	142.500. 000	97	142.500. 000	97	142.500. 000	97	570.000. 000	97	570.000. 000	97	97			Bidang Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana
10	Meningatny a kleuarga sejahtera dan keseimbang an penduduk melalui keluarga kecil bahagia sejahtera dilingkup Kab/Kota	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera		100	1.837.52 1. 093			10 0	1.703.79 9. 700	20	316.952. 100	25	433.197. 500	30	533.197. 500	25	216.952. 100	98	1.633.19 7. 500	98	1.633.197. 500	98	98			Bidang Pemberdaya an dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
		Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan		100	1.437.52 1. 093			10 0	910.009. 700	25	216.952. 100	27	225.198. 300	25	225.100. 000	25	225.198. 300	98	890.226. 700	98	890.226. 700	98	98			Bidang Pemberdaya an dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

6	Sasaran	Program Kaegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada per Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
																										Triwulan I	
											1	2	3	4	5			6								7	
				K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
			Kesejahteraan Keluarga																								
		Sub Kegiatan Orientasi/Pelatiha n Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatiha n Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		100	237.521. 093			100	179.999. 700	30	46.952. 100	35	51.022. 000	-	-	35	70.000. 000	99	160.990. 000	99	160.990. 000	99	99			Bidang Pemberdaya an dan Peningkatn Keluarga Sejahtera-
		Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		100	300.000. 000			100	280.010. 000		-	35	84.175. 000	35	80.160. 000	38	86.000. 000	98	276.010. 000	98	276.010. 000	98	98			Bidang Pemberdaya an dan Peningkatn Keluarga Sejahtera-
		Sub Kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan	umlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan		100	900.000. 000			100	450.000. 000	20	100.000. 000		-	20	100.000. 000	60	250.000. 000	100	450.000. 000	100	450.000. 000	100	100			Bidang Pemberdaya an dan Peningkatn Keluarga Sejahtera-

6	Sasaran	Program Kaegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada per Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/ d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
		Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk)																						
		Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten /Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		100	400.000.000			100	793.790.000			25	198.250.000	25	198.250.000	25	198.250.000	95	693.790.000	95	693.790.000	95	95	Bidang Pemberdaya an dan Peningakatn Keluarga Sejahtera-
		Sub Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita).		100	200.000.000			100	377.990.000		-	45	117.990.000			55	260.000.000	100	377.990.000	100	377.990.000	100	100	Bidang Pemberdaya an dan Peningakatn Keluarga Sejahtera-
		Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita) yang mendapat pendampingan		100	200.000.000			100	415.800.000		-	55	215.000.000			45	200.000.000	100	415.000.000	100	415.000.000	100	100	Bidang Pemberdaya an dan Peningakatn Keluarga Sejahtera-

Salah satu faktor penghambat pelaksanaan Rencana Kerja pada program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024 adalah ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana kerja, sumber dana PAD yang terbatas ketersediaannya, sumber dana DAK BOKB yang pelaksanaannya dilakukan oleh tenaga lini lapangan di 10 kecamatan dan ketidak sesuaian ketersediaan SPD sehingga mengakibatkan keterlambatan serapan anggaran.

Faktor pendorong pelaksanaan Rencana Kerja mekanisme perencanaan dan penganggaran dilaksanakan sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan-undangan. Sehingga pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan APBD Perubahan Tahun 2024 Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 13.269.031.940, untuk melaksanakan 10 Program 24 Kegiatan dan 54 Sub Kegiatan yang tertuang dalam DPA Perubahan. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan maka per 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp. 11.832.820.355 atau 89,18%. Jika dikaitkan dengan pencapaian target Indikator Kinerja Utama tahun 2024 mendekati ideal yaitu pada capaian target angka Kelahiran total mencapai 2,21, Indeks Pembangunan Gender mencapai 89,49 tidak tercapai, indikator Kabupaten Layak Anak dengan nilai 913,.

Rincian dari realisasi pagu beserta realisasi dan prosentase dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan dapat tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2
Realisasi Keuangan DP3AP2KB Kabupaten Seruyan
Tahun 2024

Kode		Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Keuangan		%
			Anggaran	Realisasi	
1		2	3	4	5
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	13.269.031.940	11.832.820.355	89,18
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9.242.869.590	8.292.003.259	89,71
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9.242.869.590	8.292.003.259	89,71
2.08.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.917.043.990	7.174.421.199	90,62
2.08.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.290.000	44.014.698	67,41
2.08.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	65.290.000	44.014.698	67,41
2.08.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.290.000	44.014.698	67,41
2.08.01.2.01.0006	5.1.02.01	Belanja Barang	22.650.000	18.249.500	80,57
2.08.01.2.01.0006	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	22.650.000	18.249.500	80,57
2.08.01.2.01.0006	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	19.600.000	18.249.500	93,11
2.08.01.2.01.0006	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.050.000	0,00	-
2.08.01.2.01.0006	5.1.02.02	Belanja Jasa	5.300.000	0,00	-
2.08.01.2.01.0006	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.500.000	0,00	-
2.08.01.2.01.0006	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.500.000	0,00	-
2.08.01.2.01.0006	5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	800.000	0,00	-
2.08.01.2.01.0006	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	800.000	0,00	-
2.08.01.2.01.0006	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	37.340.000	25.765.198	69,00
2.08.01.2.01.0006	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37.340.000	25.765.198	69,00
2.08.01.2.01.0006	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	37.340.000	25.765.198	69,00
2.08.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.934.541.514	4.537.705.316	91,96
2.08.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.707.086.514	4.360.391.816	92,63
2.08.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.707.086.514	4.360.391.816	92,63
2.08.01.2.02.0001	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.761.479.650	2.521.010.331	91,29
2.08.01.2.02.0001	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.911.837.544	1.837.983.369	96,14
2.08.01.2.02.0001	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.777.989.637	1.728.860.169	97,24
2.08.01.2.02.0001	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	133.847.907	109.123.200	81,53

Kode		Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Keuangan		%
			Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	
2.08.01.2.02.0001	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	149.584.354	133.869.548	89,49
2.08.01.2.02.0001	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	129.079.870	126.373.124	97,90
2.08.01.2.02.0001	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	20.504.484	7.496.424	36,56
2.08.01.2.02.0001	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	155.232.875	118.930.000	76,61
2.08.01.2.02.0001	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	123.945.875	118.930.000	95,95
2.08.01.2.02.0001	5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	31.287.000	0,00	-
2.08.01.2.02.0001	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	220.843.359	159.878.000	72,39
2.08.01.2.02.0001	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	175.047.242	143.678.000	82,08
2.08.01.2.02.0001	5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	45.796.117	16.200.000	35,37
2.08.01.2.02.0001	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	39.493.060	30.845.000	78,10
2.08.01.2.02.0001	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	34.405.560	30.845.000	89,65
2.08.01.2.02.0001	5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.087.500	0,00	-
2.08.01.2.02.0001	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	91.009.853	81.472.500	89,52
2.08.01.2.02.0001	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	80.742.870	75.606.480	93,64
2.08.01.2.02.0001	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	10.266.983	5.866.020	57,13
2.08.01.2.02.0001	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	22.500.000	6.229.562	27,69
2.08.01.2.02.0001	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	15.000.000	6.229.562	41,53
2.08.01.2.02.0001	5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	7.500.000	0,00	-
2.08.01.2.02.0001	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	52.500	26.606	50,68
2.08.01.2.02.0001	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	35.001	24.126	68,93
2.08.01.2.02.0001	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	17.499	2.480	14,17
2.08.01.2.02.0001	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	149.909.413	136.771.062	91,24
2.08.01.2.02.0001	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	140.083.224	130.116.728	92,89
2.08.01.2.02.0001	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	9.826.189	6.654.334	67,72
2.08.01.2.02.0001	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.194.558	3.751.179	60,56
2.08.01.2.02.0001	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.876.179	3.518.379	59,88
2.08.01.2.02.0001	5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	318.379	232.800	73,12
2.08.01.2.02.0001	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	14.822.134	11.253.505	75,92
2.08.01.2.02.0001	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	13.866.959	10.555.121	76,12
2.08.01.2.02.0001	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	955.175	698.384	73,12
2.08.01.2.02.0001	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.927.981.864	1.823.631.485	94,59
2.08.01.2.02.0001	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	763.038.538	708.506.345	92,85
2.08.01.2.02.0001	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	733.038.538	685.829.095	93,56

Tabel 3
Laporan Realisasi Anggaran Per Belanja
Per 31 Desember 2023

Kode	Uraian	Anggaran 2023 (Rp.)	Realisasi 2023 (Rp.)	%
2.1	BELANJA OPERASI	12.849.327.757,00	11.091.383.384,00	86,32
2.1.1	Belanja Pegawai	4.200.747.849,00	3.978.325.90400	94,71

Kode	Uraian	Anggaran 2023 (Rp.)	Realisasi 2023 (Rp.)	%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.398.579.908,00	6.341.057.480,00	85,71
2.1.6	Belanja Hibah	1.250.000.000,00	772.000.000,00	61,76
2.2	BELANJ A MODAL	567.199.000,00	557.484.551,74,00	98,29
2.2.1	Tanah	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	388.069.000,00	380.151.050,00	97,96
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	177.630.000,00	177.333.501,74,00	99,83
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	0,00	0,00
JUMLAH		13.416.526.757,00	11.648.867.935,74	86,82

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan. Capaian Kinerja Tahun 2024 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024–2026. Mengacu pada Renstra tersebut, kemudian difokuskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan tahun 2024 sebagaimana Tabel berikut ini.

Tabel 4
Capaian Indikator Kinerja Utama
DP3AP2KB Kabupaten Seruyan Tahun 2024

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
Meningkatnya Perencanaan Keluarga	TFR (Total Fertility Rate)	Orang/ tahun	2,10	2.21	2.21
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	persen	89,77	89,49	89,49
Meningkatkan kualitas layanan perangkat daerah.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	CC	CC (53,70)	CC (53,70)
Meningkatnya kondisi pembangunan yang berpihak pada anak	Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	skor	601-700	913	913

Capaian indikator kinerja utama tahun 2024 mendekati ideal dari target yang ditentukan meskipun pada Kabupaten Layak Anak belum lulus verifikasi, yang disebabkan penilaian terhadap layanan pendampingan pada setiap kasus kekerasan yang terjadi belum terlayani dengan maksimal. Hal ini menjadi catatan penting bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan terutama fungsi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak untuk lebih ditingkatkan lagi terutama peningkatan kualitas tenaga layanan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan yang menjadi faktor pendukung adalah ketersediaan data yang valid dan update serta kesesuaian program tahunan terhadap program jangka menengah yaitu sebagai bentuk konsistensi antara dokumen perencanaan. Adapun capaian program pada tahun 2024 dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 5
Capaian Indikator Kinerja Program DP3AP2KB
Kabupaten Seruyan Tahun 2024

No	Program	Indikator Program	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%
2.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	1%	1%
3.	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif.	100%	100%
4.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga.	Perempuan yang mendapatkan pelatihan ketrampilan	20 orang	20 orang
5.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase data gender dan anak yang dikelola	100%	100%
6.	Program Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Forum Anak yang dibentuk	2	2
7.	Program Perlindungan Anak.	Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komperhensif.	100%	100%
8.	Program Pengendalian Penduduk.	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,19	2,21
9.	Program Pembinaan Keluarga Berencana.	Metode kontrasepsi modern (mCPR)	78,10	78,03

No	Program	Indikator Program	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
10.	Program Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera.	Jumlah keluarga yang mengikuti kelompok ketahanan keluarga	20	17

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

A. Isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas P3AP2KB Kabupaten Seruyan :

1. **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.**
 - a. Mewujudkan PUG menjadi sasaran utama dalam pembangunan
 - b. Terwujudnya sistem data terpilah gender dan anak secara akurat dan terkini sehingga dapat mewujudkan keterbukaan informasi publik berbasis Gender dan Anak.
 - c. Mewujudkan terlaksananya Kabupaten/kota Layak Anak;
 - d. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
 - e. Peningkatan pelayanan secara komprehensif melalui pemenuhan kapasitas SDM, sarana prasarana utama dan pendukung pada UPT PPA.
 - f. Mewujudkan meraih penghargaan Anugra Parahita Ekapraya atas keberhasilan Pemerintah Daerah dan prakarsa dalam pencapaian Pembangunan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Pusat dan Daerah.
 - g. Mewujudkan adanya potensi capaian pembangunan manusia yang hilang akibat adanya kesenjangan gender dalam dimensi Kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja.

2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Meningkatkan kualitas SDM melalui pembangunan keluarga dalam melahirkan generasi yang berkualitas.

Tabel 6
Permasalahan Yang Dihadapi

NO	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Menurunnya IPG dan IDG	Kurangnya dukungan pemerintah daerah terhadap program pembangunan yang berbasis gender.
		Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender.
2	Nilai KLA belum tercapai	Kurangnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap program pembangunan yang berorientasi pada anak.
		Kurangnya kerjasama dari berbagai sektor untuk mewujudkan kabupaten layak anak
		Belum terkelolanya data gender dan anak dengan baik
3	Tingginya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	UPT PPA belum berfungsi maksimal
		Kurangnya sumber daya aparatur yang ahli untuk penanganan korban kekerasan
		Kurangnya peran aktif masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa yang terjadi disekelilingnya
		Belum optimalnya penanganan perlindungan bagi perempuan dan anak kelompok rentan sebagai upaya pengurangan resiko.
4	<i>Stunting</i> pada anak	Masih minimnya pemahaman keluarga tentang <i>stunting</i>
5	Tingginya Angka Kelahiran Total (TFR)	Rendahnya kesertaan KB yang menggunakan alat kontrasepsi MKJP

NO	Permasalahan	Akar Permasalahan
		Belum optimalnya pergerakan KB bersama mitra kerja dan pengembangan KIE
		Belum optimalnya sosialisasi tentang 8 fungsi keluarga dalam mendukung ketahanan keluarga
		Kurangnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan perkawinan usia dini

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Berikut review terhadap Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Seruyan terlihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 7

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2026

RKPD KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2026						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	SATUAN	TARGET	PAGU	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	SATUAN	TARGET	PAGU
I. URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN AN						I. URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANA					
9.556.392.932,00						9.556.392.932,00					
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Seruyan	Persen (%)	100	8.586.392.932,00	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Seruyan	Persen (%)	100	8.586.392.932,00
2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Kab. Seruyan	Dokumen	8	30.000.000,00	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Kab. Seruyan	Dokumen	8	30.000.000,00
2.08.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Seruyan	Dokumen	4	15.000.000,00	2.08.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Seruyan	Dokumen	4	15.000.000,00
2.08.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Seruyan	Dokumen	5	15.000.000,00	2.08.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Seruyan	Dokumen	5	15.000.000,00
2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase unit kerja yang mendapatkan layanan administrasi keuangannya	Kab. Seruyan	Persen (%)	100	6.520.392.932,00	2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase unit kerja yang mendapatkan layanan administrasi keuangannya	Kab. Seruyan	Persen (%)	100	6.520.392.932,00
2.08.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Seruyan	Pegawai	38	6.366.392.932,00	2.08.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Seruyan	Pegawai	38	6.366.392.932,00
2.08.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Seruyan	Dokumen	4	144.000.000,00	2.08.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Seruyan	Dokumen	4	144.000.000,00
2.08.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Seruyan	laporan	2	10.000.000,00	2.08.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Seruyan	laporan	2	10.000.000,00
2.08.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan layanan administrasi BMD	Kab. Seruyan	Persen (%)	100	10.000.000,00	2.08.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan layanan administrasi BMD	Kab. Seruyan	Persen (%)	100	10.000.000,00
2.08.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Seruyan	Dokumen	0	-	2.08.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Seruyan	Dokumen	0	-
2.08.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Seruyan	laporan	12	10.000.000,00	2.08.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Seruyan	laporan	12	10.000.000,00
2.08.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang tertangani administrasinya	Kab. Seruyan	pegawai	40	100.000.000,00	2.08.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang tertangani administrasinya	Kab. Seruyan	pegawai	40	100.000.000,00
2.08.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Seruyan	Paket	1	40.000.000,00	2.08.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Seruyan	Paket	1	40.000.000,00
2.08.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Seruyan	Dokumen	0	-	2.08.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Seruyan	Dokumen	0	-
2.08.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Seruyan	pegawai	2	20.000.000,00	2.08.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Seruyan	pegawai	2	20.000.000,00
2.08.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Seruyan	pegawai	4	40.000.000,00	2.08.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Seruyan	pegawai	4	40.000.000,00
2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan layanan administrasi umum	Kab. Seruyan	Persen (%)	100	375.000.000,00	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan layanan administrasi umum	Kab. Seruyan	Persen (%)	100	375.000.000,00
2.08.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	Paket	1	8.000.000,00	2.08.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	Paket	1	8.000.000,00
2.08.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	Paket	2	60.000.000,00	2.08.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	Paket	2	60.000.000,00
2.08.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Seruyan	Paket	2	10.000.000,00	2.08.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Seruyan	Paket	2	10.000.000,00
2.08.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	Paket	3	20.000.000,00	2.08.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	Paket	3	20.000.000,00
2.08.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Seruyan	Paket	5	10.000.000,00	2.08.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Seruyan	Paket	5	10.000.000,00
2.08.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Seruyan	Dokumen	1	5.000.000,00	2.08.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Seruyan	Dokumen	1	5.000.000,00

Ranhir Renja DP3AP2KB Tahun 2026

2.08.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Seruyan	laporan	2	10.000.000,00	2.08.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Seruyan	laporan	2	10.000.000,00
2.08.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Seruyan	Dokumen	50	252.000.000,00	2.08.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Seruyan	Dokumen	50	252.000.000,00
2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang yang diadakan	Kab. Seruyan	unit	4	100.000.000,00	2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang yang diadakan	Kab. Seruyan	unit	4	100.000.000,00
2.08.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Seruyan	unit	2	50.000.000,00	2.08.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Seruyan	unit	2	50.000.000,00
2.08.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Seruyan	unit	0	-	2.08.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Seruyan	unit	0	-
2.08.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	Kab. Seruyan	Paket	2	50.000.000,00	2.08.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	Kab. Seruyan	Paket	2	50.000.000,00

2.08.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Seruyan	unit	0	-	2.08.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Seruyan	unit	0	-
2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan layanan jasa Penunjang urusan pemerintah	Kab. Seruyan	Persen (%)	100	1.311.000.000,00	2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan layanan jasa Penunjang urusan pemerintah	Kab. Seruyan	Persen (%)	100	1.311.000.000,00
2.08.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Seruyan	laporan	12	11.000.000,00	2.08.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Seruyan	laporan	12	11.000.000,00
2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Seruyan	laporan	12	100.000.000,00	2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Seruyan	laporan	12	100.000.000,00
2.08.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	laporan	12	1.200.000.000,00	2.08.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	laporan	12	1.200.000.000,00
2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Kab. Seruyan	unit	12	140.000.000,00	2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Kab. Seruyan	unit	12	140.000.000,00
2.08.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Seruyan	unit	1	45.000.000,00	2.08.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Seruyan	unit	1	45.000.000,00
2.08.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Seruyan	unit	1	45.000.000,00	2.08.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Seruyan	unit	1	45.000.000,00
2.08.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Seruyan	unit	10	10.000.000,00	2.08.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Seruyan	unit	10	10.000.000,00
2.08.01.2.09.0001.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Seruyan	unit	1	40.000.000,00	2.08.01.2.09.0001.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Seruyan	unit	1	40.000.000,00
2.08.02. - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Kab. Seruyan	Persen (%)	1,20	575.000.000,00	2.08.02. - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Kab. Seruyan	Persen (%)	1,20	575.000.000,00
	2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Kab. Seruyan	Persen (%)	51,80	-		2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Kab. Seruyan	Persen (%)	51,80	-
2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang mendapatkan pendampingan PUG	Kab. Seruyan	lembaga	-	50.000.000,00	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang mendapatkan pendampingan PUG	Kab. Seruyan	lembaga	-	50.000.000,00
2.08.02.2.01.0010 - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat kabupaten	Kab. Seruyan	kebijakan	0	-	2.08.02.2.01.0010 - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat kabupaten	Kab. Seruyan	kebijakan	0	-

Ranhir Renja DP3AP2KB Tahun 2026

2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/ Kota Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Kab. Seruyan	lembaga	30	50.000.000,00	2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/ Kota Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Kab. Seruyan	lembaga	30	50.000.000,00
2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina	Kab. Seruyan	Organisasi	4	500.000.000,00	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina	Kab. Seruyan	Organisasi	4	500.000.000,00
2.08.02.2.02.0003 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Kab. Seruyan	orang	0	-	2.08.02.2.02.0003 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Kab. Seruyan	orang	0	-
2.08.02.2.02.0005 - Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/ Kota yang mendapatkan advokasi	Kab. Seruyan	Lembaga	4	500.000.000,00	2.08.02.2.02.0005 - Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/ Kota yang mendapatkan advokasi	Kab. Seruyan	Lembaga	4	500.000.000,00
2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan pemberdayaan perempuan	Kab. Seruyan	lembaga	1	25.000.000,00	2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan pemberdayaan perempuan	Kab. Seruyan	lembaga	1	25.000.000,00
2.08.02.2.03.0004 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Kab. Seruyan	lembaga	0	-	2.08.02.2.03.0004 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Kab. Seruyan	lembaga	0	-
2.08.02.2.03.0008 - Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Kab. Seruyan	dokumen	1	25.000.000,00	2.08.02.2.03.0008 - Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Kab. Seruyan	dokumen	1	25.000.000,00
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Peresentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif.	Kab. Seruyan	Persen (%)	100	75.000.000,00	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Peresentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif.	Kab. Seruyan	Persen (%)	100	75.000.000,00
2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah penerima manfaat	Kab. Seruyan	orang	5	50.000.000,00	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah penerima manfaat	Kab. Seruyan	orang	5	50.000.000,00
2.08.03.2.02.0001 - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Kab. Seruyan	Orang	0	-	2.08.03.2.02.0001 - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Kab. Seruyan	Orang	0	-
2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/ Kota	Kab. Seruyan	orang	5	50.000.000,00	2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/ Kota	Kab. Seruyan	orang	5	50.000.000,00
2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan sosialisasi dan edukasi	Kab. Seruyan	Dokumen	2	25.000.000,00	2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan sosialisasi dan edukasi	Kab. Seruyan	Dokumen	2	25.000.000,00

Ranhir Renja DP3AP2KB Tahun 2026

2.08.03.2.02.0005 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Kab. Seruyan	lembaga	20	25.000.000,00	2.08.03.2.02.0005 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Kab. Seruyan	lembaga	20	25.000.000,00
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang berperspektif Gender dan Hak Anak sesuai standar.	Kab. Seruyan	Indeks (%)	30	60.000.000,00	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang berperspektif Gender dan Hak Anak sesuai standar.	Kab. Seruyan	Indeks (%)	30	60.000.000,00
2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kualits keluarga	Kab. Seruyan	Kegiatan	0	-	2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kualits keluarga	Kab. Seruyan	Kegiatan	0	-
2.08.04.2.01.0002 - Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Seruyan	Dokumen	0	-	2.08.04.2.01.0002 - Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Seruyan	Dokumen	0	-
2.08.04.2.01.0003 - Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Dokumen	0	-	2.08.04.2.01.0003 - Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Dokumen	0	-
2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	Kab. Seruyan	kegiatan	2	30.000.000,00	2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	Kab. Seruyan	kegiatan	2	30.000.000,00
2.08.04.2.02.0005 - pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	Kab. Seruyan	Lembaga	2	30.000.000,00	2.08.04.2.02.0005 - pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	Kab. Seruyan	Lembaga	2	30.000.000,00
2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan keluarga mewujudkan kesetaraan gender	Kab. Seruyan	Layanan	50	30.000.000,00	2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan keluarga mewujudkan kesetaraan gender	Kab. Seruyan	Layanan	50	30.000.000,00
2.08.04.2.03.0002 - Layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	orang	50	30.000.000,00	2.08.04.2.03.0002 - Layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	orang	50	30.000.000,00
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan.	Kab. Seruyan	Indeks (%)	100	25.000.000,00	2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan.	Kab. Seruyan	Indeks (%)	100	25.000.000,00
2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengumpulan data gender	Kab. Seruyan	Kegiatan	1	25.000.000,00	2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengumpulan data gender	Kab. Seruyan	Kegiatan	1	25.000.000,00
2.08.05.2.01.0001 - Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Seruyan	Dokumen	0	-	2.08.05.2.01.0001 - Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Seruyan	Dokumen	0	-
2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Seruyan	Dokumen	1	10.000.000,00	2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Seruyan	Dokumen	1	10.000.000,00
2.08.05.2.01.0004 - Advokasi dan Penguatan Jejaring Lintas Sektor dalam Penyediaan Data	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender	Kab. Seruyan	Lembaga	6	15.000.000,00	2.08.05.2.01.0004 - Advokasi dan Penguatan Jejaring Lintas Sektor dalam	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna	Kab. Seruyan	Lembaga	6	15.000.000,00

Ranhir Renja DP3AP2KB Tahun 2026

Gender dan Anak	dna anak					Penyediaan Data Gender dan Anak	anak				
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Kab. Seruyan	Indeks (%)	51,80	140.000.000,00	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Kab. Seruyan	Indeks (%)	51,80	140.000.000,00
2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang mendapatkan pembinaan	Kab. Seruyan	Kecamatan	8	50.000.000,00	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang mendapatkan pembinaan	Kab. Seruyan	Kecamatan	8	50.000.000,00
2.08.06.2.01.0001 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Kab. Seruyan	Organisasi	0		2.08.06.2.01.0001 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Kab. Seruyan	Organisasi	0	
2.08.06.2.01.0005 - Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Lembaga	6	50.000.000,00	2.08.06.2.01.0005 - Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Lembaga	6	50.000.000,00
2.08.06+81:86.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga/ Forum Anak Daerah yang dibentuk di tingkat kecamatan.	Kab. Seruyan	Lembaga	3	90.000.000,00	2.08.06+81:86.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga/ Forum Anak Daerah yang dibentuk di tingkat kecamatan.	Kab. Seruyan	Lembaga	3	90.000.000,00
2.08.06.2.02.0003 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Dokumen	0		2.08.06.2.02.0003 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Dokumen	0	
2.08.06.2.02.0006 - Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Dokumen	1	30.000.000,00	2.08.06.2.02.0006 - Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Dokumen	1	30.000.000,00
2.08.06.2.02.0007 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Kab. Seruyan	Lembaga	3	30.000.000,00	2.08.06.2.02.0007 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Kab. Seruyan	Lembaga	3	30.000.000,00
2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	Kab. Seruyan	Lembaga	2	30.000.000,00	2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	Kab. Seruyan	Lembaga	2	30.000.000,00
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1. Presentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif.	Kab. Seruyan	Persen (%)	100	95.000.000,00	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1. Presentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif.	Kab. Seruyan	Persen (%)	100	95.000.000,00
	2. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Kab. Seruyan	Indeks (%)	79,91			2. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Kab. Seruyan	Indeks (%)	79,91	

2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus yg mendapatkan pengaduan	Kab. Seruyan	kasus	10	55.000.000,00	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus yg mendapatkan pengaduan	Kab. Seruyan	kasus	10	55.000.000,00
2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Orang	10	55.000.000,00	2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Orang	10	55.000.000,00
2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga	Kab. Seruyan	Kegiatan	2	40.000.000,00	2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga	Kab. Seruyan	Kegiatan	2	40.000.000,00
2.08.07.2.03.0005 - Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Dokumen	0	-	2.08.07.2.03.0005 - Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Dokumen	0	-
2.08.07.2.03.0007 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Kab. Seruyan	Dokumen	2	40.000.000,00	2.08.07.2.03.0007 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Kab. Seruyan	Dokumen	2	40.000.000,00
II. URUSAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA		Kab. Seruyan			2.310.000.000,00	II. URUSAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA		Kab. Seruyan			2.310.000.000,00
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Kab. Seruyan	Jiwa (Orang/Anak)	2,20	450.000.000,00	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Kab. Seruyan	Jiwa (Orang/Anak)	2,20	450.000.000,00
	2. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kab. Seruyan	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	38,30			2. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kab. Seruyan	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	38,30	
2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen Kebijakan yang disusun	Kab. Seruyan	Dokumen	1	280.000.000,00	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen Kebijakan yang disusun	Kab. Seruyan	Dokumen	1	280.000.000,00
2.14.02.2.01.0002 - Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	dokumen	0		2.14.02.2.01.0002 - Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	dokumen	0	
2.14.02.2.01.0025 - Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Dokumen	1	200.000.000,00	2.14.02.2.01.0025 - Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Dokumen	1	200.000.000,00
2.14.02.2.01.0027 -Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur	Kab. Seruyan	Satuan Pendidikan	4	80.000.000,00	2.14.02.2.01.0027 -Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan	Kab. Seruyan	Satuan Pendidikan	4	80.000.000,00
2.14.02.2.01.0033 - Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Kalur Pendidikan Nonformal dan insformal sesuai isu lokal kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Dokumen	0		2.14.02.2.01.0033 - Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Kalur Pendidikan Nonformal dan insformal sesuai isu lokal kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Dokumen	0	

Ranhir Renja DP3AP2KB Tahun 2026

2.14.02.2.01.0034 - Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Kab. Seruyan	Perangkat Daerah	0		2.14.02.2.01.0034 - Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Kab. Seruyan	Perangkat Daerah	0	
2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab	Cakupan Pelaporan Data per kecamatan	Kab. Seruyan	Persen (%)	100	170.000.000,00	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab	Cakupan Pelaporan Data per kecamatan	Kab. Seruyan	Persen (%)	100	170.000.000,00
2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kab. Seruyan	Laporan	12	25.000.000,00	2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kab. Seruyan	Laporan	12	25.000.000,00
2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Kab. Seruyan	Dokumen	1	80.000.000,00	2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Kab. Seruyan	Dokumen	1	80.000.000,00
2.14.02.2.02.0016 - Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk	Kab. Seruyan	Laporan	4		2.14.02.2.02.0016 - Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk	Kab. Seruyan	Laporan	4	
2.14.02.2.02.0026 - Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Kab. Seruyan	Unit	100	65.000.000,00	2.14.02.2.02.0026 - Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Kab. Seruyan	Unit	100	65.000.000,00

2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1. Angka Prevalensi Kontraspepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Kab. Seruyan	Persen (%)	75,00	1.055.000.000,00	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1. Angka Prevalensi Kontraspepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Kab. Seruyan	Persen (%)	75,00	1.055.000.000,00
	2. Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	Kab. Seruyan	Persen (%)	6,80			2. Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	Kab. Seruyan	Persen (%)	6,80	
	Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Kab. Seruyan		5,40			Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Kab. Seruyan		5,40	
2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase keluarga yang terpapar Bangsa Kencana	Kab. Seruyan	Persen (%)	32,00	300.000.000,00	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase keluarga yang terpapar Bangsa Kencana	Kab. Seruyan	Persen (%)	32,00	300.000.000,00
2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kab. Seruyan	Laporan	10	150.000.000,00	2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kab. Seruyan	Laporan	10	150.000.000,00
2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Seruyan	Dokumen	10	150.000.000,00	2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Seruyan	Dokumen	10	150.000.000,00
2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Kab. Seruyan	Dokumen	0		2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Kab. Seruyan	Dokumen	0	
2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Lini Lapangan yang diberdayakan	Kab. Seruyan	Persen (%)	100	375.000.000,00	2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Lini Lapangan yang diberdayakan	Kab. Seruyan	Persen (%)	100	375.000.000,00

Ranhir Renja DP3AP2KB Tahun 2026

2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Seruyan	Kader	100	300.000.000,00	2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Seruyan	Kader	100	300.000.000,00
2.14.03.2.02.0005 - Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kab. Seruyan	Organisasi	100	25.000.000,00	2.14.03.2.02.0005 - Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kab. Seruyan	Organisasi	100	25.000.000,00
2.14.03.2.02.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab. Seruyan	Laporan	1	50.000.000,00	2.14.03.2.02.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab. Seruyan	Laporan	1	50.000.000,00
2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasyankes	Kab. Seruyan	Fasyankes	24	250.000.000,00	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasyankes	Kab. Seruyan	Fasyankes	24	250.000.000,00
2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Seruyan	Laporan	12	50.000.000,00	2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Seruyan	Laporan	12	50.000.000,00
2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Seruyan	orang	114	100.000.000,00	2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Seruyan	orang	114	100.000.000,00
2.14.03.2.03.0006 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Seruyan	Unit	2	50.000.000,00	2.14.03.2.03.0006 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Seruyan	Unit	2	50.000.000,00
2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Seruyan	Laporan	12	50.000.000,00	2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Seruyan	Laporan	12	50.000.000,00
2.14.03.2.03.0011 - Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kab. Seruyan	Laporan	0	-	2.14.03.2.03.0011 - Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kab. Seruyan	Laporan	0	-
2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pengurus Pokja Kampung KB	Kab. Seruyan	Kelompok	100	130.000.000,00	2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pengurus Pokja Kampung KB	Kab. Seruyan	Kelompok	100	130.000.000,00
2.14.03.2.04.0004 - Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kab. Seruyan	laporan	0	-	2.14.03.2.04.0004 - Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kab. Seruyan	laporan	0	-
2.14.03.2.04.0005 - Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Kab. Seruyan	Unit	100	70.000.000,00	2.14.03.2.04.0005 - Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Kab. Seruyan	Unit	100	70.000.000,00
2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kab. Seruyan	Kampung	100	30.000.000,00	2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kab. Seruyan	Kampung	100	30.000.000,00
2.14.03.2.04.0007 - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kab. Seruyan	Dokumen	1	30.000.000,00	2.14.03.2.04.0007 - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kab. Seruyan	Dokumen	1	30.000.000,00

Ranhir Renja DP3AP2KB Tahun 2026

1.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga.	Kab. Seruyan	Persen (%)	90	805.000.000,00	1.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga.	Kab. Seruyan	Persen (%)	90	805.000.000,00
	Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja	Kab. Seruyan		89,80			Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja	Kab. Seruyan		89,80	
	Indeks Lansia Berdaya	Kab. Seruyan		61,60			Indeks Lansia Berdaya	Kab. Seruyan		61,60	
2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase keluarga yang mendapatkan pembinaan	Kab. Seruyan	Persen (%)	45	505.000.000,00	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase keluarga yang mendapatkan pembinaan	Kab. Seruyan	Persen (%)	45	505.000.000,00
2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kab. Seruyan	Laporan	5	50.000.000,00	2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kab. Seruyan	Laporan	5	50.000.000,00
2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Kab. Seruyan	Unit	1	50.000.000,00	2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Kab. Seruyan	Unit	1	50.000.000,00
2.14.04.2.01.0019 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab. Seruyan	Kader	0		2.14.04.2.01.0019 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab. Seruyan	Kader	0	
2.14.04.2.01.0020 - Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kab. Seruyan	orang	30	25.000.000,00	2.14.04.2.01.0020 - Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kab. Seruyan	orang	30	25.000.000,00
2.14.04.2.01.0021 -Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab. Seruyan	Laporan	10	150.000.000,00	2.14.04.2.01.0021 -Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab. Seruyan	Laporan	10	150.000.000,00
2.14.04.2.01.0024 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Kab. Seruyan	orang	378	80.000.000,00	2.14.04.2.01.0024 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Kab. Seruyan	orang	378	80.000.000,00
2.14.04.2.01.0028 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Kab. Seruyan	Kelompok	20	150.000.000,00	2.14.04.2.01.0028 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Kab. Seruyan	Kelompok	20	150.000.000,00
2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah		Kab. Seruyan	organisasi	3		2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang	Kab. Seruyan	organisasi	3	300.000.000,00

Ranhir Renja DP3AP2KB Tahun 2026

Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam pembangunan keluarga				300.000.000,00	Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	terlibat dalam pembangunan keluarga				
2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)	Kab. Seruyan	Laporan	2	150.000.000,00	2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/Balita)	Kab. Seruyan	Laporan	2	150.000.000,00
2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Kab. Seruyan	Laporan	2	150.000.000,00	2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Kab. Seruyan	Laporan	2	150.000.000,00
TOTAL I + II (PPA dan KB)					11.866.392.932,00	TOTAL I + II (PPA dan KB)					11.866.392.932,00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil dari forum gabungan Perangkat Daerah mengenai daftar usulan program kegiatan prioritas kecamatan tahun anggaran 2025, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian oleh Dinas P3AP2KB Kabupaten Seruyan yaitu :

Tabel 8
Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

No .	Pengusu 1	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kelurahan / Desa	Kecamatan
	TIDAK ADA USULAN					

Sedangkan untuk Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Seruyan **tidak ada** usulan yang diajukan dalam Rencana Kerja Dinas P3AP2KB Kabupaten Seruyan Tahun 2025 sebagaimana dalam RKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2026 :

Tabel 9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan
-	TIDAK ADA USULAN				-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Tujuan KPPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi KPPPA adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
2. Meningkatkan pemenuhan hak anak;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pembangunan PPPA;
4. Meningkatkan perlindungan hak perempuan dan kekerasan termasuk TPPO;
5. Meningkatkan perlindungan khusus anak; dan
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di KPPPA.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah :

1. Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan;
2. Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
4. Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO;

5. Meningkatnya layanna bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus.

Sedangkan telaahan terhadap urusan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Rencana Strategis BKKBN yaitu memiliki tujuan :

- 1) Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia.
- 2) Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

Sesuai tugas dan fungsi Dinas P3AP2KB Kabupaten Seruyan mendukung pencapaian sasaran BKKBN ditetapkan sasaran yang harus dicapai sebagai berikut :

- 1) Menurunnya angka kelahiran total (TFR mencapai 2,21 pada tahun 2024 dari target 2,10 tahun 2024
- 2) Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (mPCR) mencapai 66,20 pada tahun 2024 dari target 69,20 tahun 2024.
- 3) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmeet Need mencapai 6,80 pada tahun 2024 target 6,00 tahun 2024.
- 4) Menurunnya angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 tahun (ASFR) dengan capaian 34,07 , dan ditargetkan 22 tahun 2024.
- 5) Meningkatnya indeks pembangunan keluarga (iBAngga) sebesar 64,43 pada tahun 2024 dari target 50,00 tahun 2024.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada waktu tertentu. Pencapaian tujuan dimaksudkan sebagai arah perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dinas P3AP2KB Kabupaten Seruyan mempunyai tujuan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Rancangan Akhir Rencana Strategis 2025-2029 adalah : ***Mewujudkan Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Keluarga Yang Berkualitas Sebagai Dasar Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan.***

SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan. Dinas P3AP2KB mempunyai sasaran yaitu :

1. Meningkatkan kualitas perempuan.
2. Meningkatkan pendampingan dan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan.
3. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak.
4. Meningkatkan pendampingan kasus terhadap anak korban kekerasan.
5. Meningkatkan kesertaan ber-KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS).
6. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
7. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

3.3.1 Program Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan.

A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- 1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
- 3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.
 - 2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
 - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 - 4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
 - 7) Fasilitas Kunjungan Tamu.
 - 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

9 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan

Kabupaten/Kota

1) Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota

2) Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota Kota

10 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

2) Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota

11 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

2) Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota

C Program Perlindungan Perempuan

12 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

- 1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- 2) Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota.
- 13 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

D Program Peningkatan Kualitas Keluarga

- 14 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - 2) Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.
- 15 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.

- 16 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota
- E Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak.
 - 17 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - 2) Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota.
 - 3) Advokasi dan Penguatan Jejaring Lintas Sektor dalam Penyediaan Data Gender dan Anak.
- F Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).
 - 18 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - 2) Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha.
 - 19 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

- 1) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
- 3) Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
- 4) Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

G Program Perlindungan Khusus Anak.

20 Penyediaan Layanan bagi Anak yang.

Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

- 1) Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

21 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

- 1) Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota.

H Program Pengendalian Penduduk.

22 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk.

- 1) Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota.
 - 2) Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
 - 3) Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal.
 - 4) Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Kalur Pendidikan Nonformal dan insformal sesuai isu lokal kabupaten/kota.
 - 5) Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.
- 23 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten.
- 1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga.
 - 2) Penyediaan Data dan Informasi Keluarga.
 - 3) Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota.
 - 4) Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain.

I Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB).

- 24 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - 1) Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana
 - 2) Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
 - 3) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal
- 25 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - 1) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
 - 2) Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
 - 3) Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
- 26 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - 2) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

- 3) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 - 4) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
- Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
- 27 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
- 1) Pembinaan Terpadu Kampung KB
 - 2) Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas
 - 3) Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
- Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
- J Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
- 28 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- 1) Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
 - 2) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
 - 3) Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

- 4) Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga
 - 5) Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
 - 6) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
 - 7) Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
- 29 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- 1) Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
 - 2) Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)

3.3.2 Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional.

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan yang mendukung pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2026 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 10
Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

Kodefikasi					Urusan/ Bidang Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Prioritas Nasional Tahun 2026
							Target	Pagu	
2	14				Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
2	14	03			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR))	75,00%	70.000.000	
						Persentase Kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	6,80%		
						Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	5,40%		
2	14	03	2.04		Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pengurus Pokja Kampung KB	100 kelompok	70.000.000	
2	14	03	2.04	0005	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	100	70.000.000	Penurunan Prevalensi Stunting

2	14	04			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga.	80%	300.000.000	
						Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja	88,20%		
						Indeks Lansia Berdaya	58,20%		
2	14	04	2.02		Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam pembangunan keluarga	3	300.000.000	
2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Sub Kegiatan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)	2 Laporan	150.000.000	Penurunan Prevalensi Stunting
2	14	04	2.02	0006	Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	2 Laporan	150.000.000	Penurunan Prevalensi Stunting
Jumlah								300.000.000	

3.3.3 Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026.

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan yang mendukung pencapaian Prioritas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 11
Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026

Kodefikasi					Urusan/ Bidang Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Prioritas Provinsi Kalimantan Tengah 2026
							Target	Pagu	
2	14				Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
2	14	03			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR))	75,00%	70.000.000	
						Persentase Kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	6,80%		
						Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	5,40%		
2	14	03	2.04		Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pengurus Pokja Kampung KB	100 kelompok	70.000.000	
2	14	03	2.04	0005	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT)	Jumlah DASHAT di Kampung KB	100	70.000.000	Pendampingan ibu hamil dan pasca hamil

					di Kampung Keluarga Berkualitas				
2	14	04			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga.	80%	300.000.000	
						Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja	88,20%		
						Indeks Lansia Berdaya	58,20%		
2	14	04	2.02		Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam pembangunan keluarga	3	300.000.000	
2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Sub Kegiatan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)	2 Laporan	150.000.000	Pendampingan ibu hamil dan pasca hamil
2	14	04	2.02	0006	Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita) yang mendapat pendampingan	2 Laporan	150.000.000	Pendampingan ibu hamil dan pasca hamil
Jumlah								300.000.000	

3.3.4 Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan yang mendukung pencapaian Prioritas Kabupaten Seruyan Tahun 2026 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 12
Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian
Prioritas Kabupaten Seruyan Tahun 2026

Kodefikasi					Urusan/ Bidang Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Prioritas Kabupaten Seruyan Tahun 2026
							Target	Pagu	
2	08				Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			76.750.000	
2	08	03			Program Perlindungan Perempuan	Peresentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif.	100%	21.750.000	
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penerima manfaat	2 orang	21.750.000	
2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	2 orang	21.750.000	Pelayanan Umum
2	08	07			Program Perlindungan Khusus Anak	Presentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif.	100%	55.000.000	
						Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	79,82		

2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam pembangunan keluarga	10 orang	55.000.000	
2	08	07	2.02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	10 orang	55.000.000	Pelayanan Umum
2	14				Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			200.000.000	
2	14	02			Program Pengendalian Penduduk.	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,20 orang/jiwa	200.000.000	
						Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	38,60 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 Tahun		
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen Kebijakan yang disusun		200.000.000	
2	14	02	2.01	0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota		200.000.000	Pelayanan Umum
Jumlah								276.750.000	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dinas P3AP2KB Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tahun 2026 telah menyusun Rencana Kerja dengan pagu **Rp. 11866.392.932,00,-** yang terbagi dalam **10 Program, 29 Kegiatan dan 81 Sub Kegiatan**, sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 13

Rencana Kerja dan Pendanaan

Tabel 13
Rencana Kerja dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			SATUAN	TARGET	PAGU	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
I. URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					9.556.392.932,00	APBDII			9.869.066.873,00
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Seruyan	Persen (%)	100	8.586.392.932,00	APBDII		100	9.024.066.873,00
2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Kab. Seruyan	Dokumen	8	30.000.000,00	APBDII		8	30.000.000,00
2.08.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Seruyan	Dokumen	4	15.000.000,00	APBDII		4	15.000.000,00
2.08.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Seruyan	Dokumen	5	15.000.000,00	APBDII		5	15.000.000,00
2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase unit kerja yang mendapatkan layanan administrasi keuangannya	Kab. Seruyan	Persen (%)	100	6.520.392.932,00	APBDII		100	6.872.066.873,00
2.08.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Seruyan	Pegawai	38	6.366.392.932,00	APBDII		40	6.752.066.873,00
2.08.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Seruyan	Dokumen	4	144.000.000,00	APBDII		4	100.000.000,00
2.08.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Seruyan	laporan	2	10.000.000,00	APBDII		2	20.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			SATUAN	TARGET	PAGU	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
2.08.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan layanan administrasi BMD	Kab. Seruyan	Persen (%)	100	10.000.000,00	APBDII		100	10.000.000,00
2.08.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Seruyan	Dokumen	0	-	APBDII		0	-
2.08.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Seruyan	laporan	12	10.000.000,00	APBDII		12	10.000.000,00
2.08.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang tertangani administrasinya	Kab. Seruyan	pegawai	40	100.000.000,00	APBDII		40	100.000.000,00
2.08.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Seruyan	Paket	1	40.000.000,00	APBDII		1	40.000.000,00
2.08.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Seruyan	Dokumen	0	-	APBDII		0	-
2.08.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Seruyan	pegawai	2	20.000.000,00	APBDII		2	30.000.000,00
2.08.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Seruyan	pegawai	4	40.000.000,00	APBDII		4	30.000.000,00
2.08.01.2.06 - Administrasi	Persentase unit kerja					APBDII			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			SATUAN	TARGET	PAGU	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Umum Perangkat Daerah	yang mendapatkan layanan administrasi umum	Kab. Seruyan	Persen (%)	100	375.000.000,00			100	413.000.000,00
2.08.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	Paket	1	8.000.000,00	APBDII		1	8.000.000,00
2.08.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	Paket	2	60.000.000,00	APBDII		2	50.000.000,00
2.08.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Seruyan	Paket	2	10.000.000,00	APBDII		2	10.000.000,00
2.08.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	Paket	3	20.000.000,00	APBDII		3	20.000.000,00
2.08.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Seruyan	Paket	5	10.000.000,00	APBDII		5	10.000.000,00
2.08.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Seruyan	Dokumen	1	5.000.000,00	APBDII		1	5.000.000,00
2.08.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Seruyan	laporan	2	10.000.000,00	APBDII		2	10.000.000,00
2.08.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kab.	Dokumen	50	252.000.000,00	APBDII		50	300.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			SATUAN	TARGET	PAGU	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SKPD	Seruyan							
2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang yang diadakan	Kab. Seruyan	unit	4	100.000.000,00	APBDII		3	150.000.000,00
2.08.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Seruyan	unit	2	50.000.000,00	APBDII		2	50.000.000,00
2.08.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Seruyan	unit	0	-	APBDII		1	30.000.000,00
2.08.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	Kab. Seruyan	Paket	2	50.000.000,00	APBDII		1	20.000.000,00
2.08.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Seruyan	unit	0	-	APBDII		1	50.000.000,00
2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan layanan jasa Penunjang urusan pemerintah	Kab. Seruyan	Persen (%)	100	1.311.000.000,00	APBDII		100	1.294.000.000,00
2.08.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Seruyan	laporan	12	11.000.000,00	APBDII		12	11.000.000,00
2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Kab. Seruyan	laporan	12	100.000.000,00	APBDII		12	133.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			SATUAN	TARGET	PAGU	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								
2.08.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	laporan	12	1.200.000.000,00	APBDII		12	1.150.000.000,00
2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Kab. Seruyan	unit	12	140.000.000,00	APBDII		13	155.000.000,00
2.08.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkanPajaknya	Kab. Seruyan	unit	1	45.000.000,00	APBDII		1	50.000.000,00
2.08.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Seruyan	unit	1	45.000.000,00	APBDII		1	45.000.000,00
2.08.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Seruyan	unit	10	10.000.000,00	APBDII		10	10.000.000,00
2.08.01.2.09.0001.0010 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Seruyan	unit	1	40.000.000,00	APBDII		1	50.000.000,00
2.08.01.2.09.0001.0010 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Seruyan	unit	1	40.000.000,00	APBDII		1	50.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			SATUAN	TARGET	PAGU	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
2.08.02. - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Kab. Seruyan	Persen (%)	1,20	575.000.000,00	APBDII		1,40	455.000.000,00
	2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Kab. Seruyan	Persen (%)	51,80	-	APBDII		52,75	
2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang mendapatkan pendampingan PUG	Kab. Seruyan	lembaga		50.000.000,00	APBDII		40	30.000.000,00
2.08.02.2.01.0010 - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat kabupaten	Kab. Seruyan	kebijakan	0	-	APBDII		1	15.000.000,00
2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Kab. Seruyan	lembaga	30	50.000.000,00	APBDII		30	15.000.000,00
2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina	Kab. Seruyan	Organisasi	4	500.000.000,00	APBDII		4	400.000.000,00
2.08.02.2.02.0003 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Kab. Seruyan	orang	0	-	APBDII		0	-
2.08.02.2.02.0005 - Advokasi Peningkatan Partisipasi	Jumlah lembaga masyarakat dan	Kab. Seruyan	Lembaga	4	500.000.000,00	APBDII		4	400.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			SATUAN	TARGET	PAGU	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi								
2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan pemberdayaan perempuan	Kab. Seruyan	lembaga	1	25.000.000,00	APBDII		1	25.000.000,00
2.08.02.2.03.0004 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Kab. Seruyan	lembaga	0	-	APBDII		-	-
2.08.02.2.03.0008 - Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Kab. Seruyan	dokumen	1	25.000.000,00	APBDII		1	25.000.000,00
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Peresentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif.	Kab. Seruyan	Persen (%)	100	75.000.000,00	APBDII		100	75.000.000,00
2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penerima manfaat	Kab. Seruyan	orang	5	50.000.000,00	APBDII		5	50.000.000,00
2.08.03.2.02.0001 - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Kab. Seruyan	Orang	0	-	APBDII		0	-

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			SATUAN	TARGET	PAGU	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	orang	5	50.000.000,00	APBDII		5	50.000.000,00
2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan sosialisasi dan edukasi	Kab. Seruyan	Dokumen	2	25.000.000,00	APBDII		2	25.000.000,00
2.08.03.2.02.0005 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Kab. Seruyan	lembaga	20	25.000.000,00	APBDII		20	25.000.000,00
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang berperspektif Gender dan Hak Anak sesuai standar.	Kab. Seruyan	Indeks (%)	30	60.000.000,00	APBDII		40	60.000.000,00
2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kualits keluarga	Kab. Seruyan	Kegiatan	0	-	APBDII		0	-
2.08.04.2.01.0002 - Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Seruyan	Dokumen	0	-	APBDII		0	-

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			SATUAN	TARGET	PAGU	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
2.08.04.2.01.0003 - Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Dokumen	0	-	APBDII		0	-
2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	Kab. Seruyan	kegiatan	2	30.000.000,00	APBDII		2	30.000.000,00
2.08.04.2.02.0005 - pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	Kab. Seruyan	Lembaga	2	30.000.000,00	APBDII		2	30.000.000,00
2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan keluarga mewujudkan kesetaraan gender	Kab. Seruyan	Layanan	50	30.000.000,00	APBDII		50	30.000.000,00
2.08.04.2.03.0002 - Layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	orang	50	30.000.000,00	APBDII		50	30.000.000,00
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan.	Kab. Seruyan	Indeks (%)	100	25.000.000,00	APBDII		100	25.000.000,00
2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan	Jumlah kegiatan pengumpulan data gender	Kab. Seruyan	Kegiatan	1	25.000.000,00	APBDII		1	25.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			SATUAN	TARGET	PAGU	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengumpulan data gender	Kab. Seruyan	Kegiatan	1	25.000.000,00	APBDII		1	25.000.000,00
2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengumpulan data gender	Kab. Seruyan	Kegiatan	1	25.000.000,00	APBDII		1	25.000.000,00
2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Seruyan	Dokumen	1	10.000.000,00	APBDII		1	10.000.000,00
2.08.05.2.01.0004 - Advokasi dan Penguatan Jejaring Lintas Sektor dalam Penyediaan Data Gender dan Anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak	Kab. Seruyan	Lembaga	6	15.000.000,00	APBDII		6	15.000.000,00
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Kab. Seruyan	Indeks (%)	51,80	140.000.000,00	APBDII		60,00	140.000.000,00
2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang mendapatkan pembinaan	Kab. Seruyan	Kecamatan	8	50.000.000,00	APBDII		10	50.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			SATUAN	TARGET	PAGU	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
2.08.06.2.01.0001 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Kab. Seruyan	Organisasi	0	-	APBDII		0	-
2.08.06.2.01.0005 - Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Lembaga	6	50.000.000,00	APBDII		6	50.000.000,00
2.08.06+81:86.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga/ Forum Anak Daerah yang dibentuk di tingkat kecamatan.	Kab. Seruyan	Lembaga	3	90.000.000,00	APBDII		3	90.000.000,00
2.08.06.2.02.0003 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Dokumen	0	-	APBDII		0	-
	Jumlah kerjasama antar	Kab.	Dokumen	1	30.000.000,00	APBDII		1	30.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			SATUAN	TARGET	PAGU	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
2.08.06.2.02.0006 - Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/KotaJumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Seruyan							
2.08.06.2.02.0007 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Kab. Seruyan	Lembaga	3	30.000.000,00	APBDII		3	30.000.000,00
2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	Kab. Seruyan	Lembaga	2	30.000.000,00	APBDII		2	30.000.000,00
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1. Presentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif.	Kab. Seruyan	Persen (%)	100	95.000.000,00	APBDII		100	90.000.000,00
	2. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Kab. Seruyan	Indeks (%)	79,91		APDII		79,93	
2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah	Jumlah kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus yg mendapatkan pengaduan	Kab. Seruyan	kasus	10	55.000.000,00	APBDII		12	50.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			SATUAN	TARGET	PAGU	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Kabupaten/Kota									
2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Orang	10	55.000.000,00	APBDII		12	50.000.000,00
2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga	Kab. Seruyan	Kegiatan	2	40.000.000,00	APBDII		2	40.000.000,00
2.08.07.2.03 .0005 - Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Dokumen	0		APBDII		0	
2.08.07.2.03 .0007 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Kab. Seruyan	Dokumen	2	40.000.000,00	APBDII		2	40.000.000,00
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Kab. Seruyan	Jiwa (Orang/ Anak)	2,20	450.000.000,00	APBDII		2,20	395.000.000,00
	2. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kab. Seruyan	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	38,30		APBDII		37,90	
2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan	Jumlah Dokumen Kebijakan yang disusun	Kab. Seruyan	Dokumen	1	280.000.000,00	APBDII		1	200.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			SATUAN	TARGET	PAGU	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk									
2.14.02.2.01.0002 - Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	dokumen	0	-	APBDII		0	-
2.14.02.2.01.0025 - Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Dokumen	1	200.000.000,00	APBDII		1	50.000.000,00
2.14.02.2.01.0027 -Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Kab. Seruyan	Satuan Pendidikan	4	80.000.000,00	APBDII		4	50.000.000,00
2.14.02.2.01.0033 - Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Kalur Pendidikan Nonformal dan insformal sesuai isu lokal kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Dokumen	0	-	APBDII		2	30.000.000,00
2.14.02.2.01.0034 - Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukuranya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks	Kab. Seruyan	Perangkat Daerah	0	-	APBDII		10	70.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			SATUAN	TARGET	PAGU	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah								
2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab	Cakupan Pelaporan Data per kecamatan	Kab. Seruyan	Persen (%)	100	170.000.000,00	APBDII		100	195.000.000,00
2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kab. Seruyan	Laporan	12	25.000.000,00	APBDII		12	40.000.000,00
2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Kab. Seruyan	Dokumen	1	80.000.000,00	APBDII		1	80.000.000,00
2.14.02.2.02.0016 - Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk	Kab. Seruyan	Laporan	4	-	APBDII		4	40.000.000,00
2.14.02.2.02.0026 - Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Kab. Seruyan	Unit	100	65.000.000,00	APBDIII		100	35.000.000,00
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Kab. Seruyan	Persen (%)	75,00	1.055.000.000,00	APBDII		75,00	905.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			SATUAN	TARGET	PAGU	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	2. Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	Kab. Seruyan	Persen (%)	6,80		APBDII		6,80	
	Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Kab. Seruyan		5,40		APBDII		4,70	
2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase keluarga yang terpapar Bangga Kencana	Kab. Seruyan	Persen (%)	32,00	300.000.000,00	APBDII		32,50	300.000.000,00
2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kab. Seruyan	Laporan	10	150.000.000,00	APBDII		10	150.000.000,00
2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Seruyan	Dokumen	10	150.000.000,00	APBDII		10	100.000.000,00
2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana	Kab. Seruyan	Dokumen	0	-	APBDII		10	50.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			SATUAN	TARGET	PAGU	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan								
2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Lini Lapangan yang diberdayakan	Kab. Seruyan	Persen (%)	100	375.000.000,00	APBDII		100	235.000.000,00
2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Seruyan	Kader	100	300.000.000,00	APBDII		100	150.000.000,00
2.14.03.2.02.0005 - Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kab. Seruyan	Organisasi	100	25.000.000,00	APBDII		100	35.000.000,00
2.14.03.2.02.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kab. Seruyan	Laporan	1	50.000.000,00	APBDII		1	50.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			SATUAN	TARGET	PAGU	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(PKB/PLKB)	untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)								
2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasyankes	Kab. Seruyan	Fasyankes	24	250.000.000,00	APBDII		24	240.000.000,00
2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Seruyan	Laporan	12	50.000.000,00	APBDII		12	50.000.000,00
2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang(MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Seruyan	orang	114	100.000.000,00	APBDII		114	50.000.000,00
2.14.03.2.03.0006 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Seruyan	Unit	2	50.000.000,00	APBDII		2	50.000.000,00
2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Seruyan	Laporan	12	50.000.000,00	APBDII		12	50.000.000,00
2.14.03.2.03.0011 - Dukungan Operasional Pelayanan KB	Jumlah Laporan	Kab.	Laporan	0	-	APBDII		10	40.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			SATUAN	TARGET	PAGU	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Bergerak	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Seruyan							
2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pengurus Pokja Kampung KB	Kab. Seruyan	Kelompok	100	130.000.000,00	APBDII		100	130.000.000,00
2.14.03.2.04.0004 - Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kab. Seruyan	laporan	0	-	APBDII		0	-
2.14.03.2.04.0005 - Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Kab. Seruyan	Unit	100	70.000.000,00	APBDII		100	70.000.000,00
2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kab. Seruyan	Kampung	100	30.000.000,00	APBDII		100	30.000.000,00
2.14.03.2.04.0007 - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kab. Seruyan	Dokumen	1	30.000.000,00	APBDII		1	30.000.000,00
1.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga.	Kab. Seruyan	Persen (%)	90	805.000.000,00	APBDII		95	830.000.000,00
	Indeks Pengasuhan	Kab.		89,80		APBDII		90,60	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			SATUAN	TARGET	PAGU	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	Keluarga Remaja	Seruyan							
	Indeks Lansia Berdaya	Kab. Seruyan		61,60		APBDII		63,20	
2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase keluarga yang mendapatkan pembinaan	Kab. Seruyan	Persen (%)	45	505.000.000,00	APBDII		50	530.000.000,00
2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kab. Seruyan	Laporan	5	50.000.000,00	APBDII		5	50.000.000,00
2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Kab. Seruyan	Unit	1	50.000.000,00	APBDII		1	50.000.000,00
2.14.04.2.01.0019 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab. Seruyan	Kader	0	-	APBDII		0	-

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			SATUAN	TARGET	PAGU	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
2.14.04.2.01.0020 - Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kab. Seruyan	orang	30	25.000.000,00	APBDII		35	50.000.000,00
2.14.04.2.01.0021 -Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Kab. Seruyan	Laporan	10	150.000.000,00	APBDII		10	150.000.000,00
2.14.04.2.01.0024 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan.	Kab. Seruyan	orang	378	80.000.000,00	APBDII		378	80.000.000,00
2.14.04.2.01.0028 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan	Kab. Seruyan	Kelompok	20	150.000.000,00	APBDII		20	150.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	LOKASI	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			SATUAN	TARGET	PAGU	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk								
2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam pembangunan keluarga	Kab. Seruyan	organisasi	3	300.000.000,00	APBDII		3	300.000.000,00
2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)	Kab. Seruyan	Laporan	2	150.000.000,00	APBDII		2	150.000.000,00
2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Kab. Seruyan	Laporan	2	150.000.000,00	APBDII		2	150.000.000,00
TOTAL I + II (PPA dan KB)					11.866.392.932,00				11.999.066.873,00

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas P3AP2KB Kabupaten Seruyan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas P3AP2KB Kabupaten Seruyan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan.

Rencana Kerja Tahun 2026 ini disusun dengan mempertimbangkan prioritas dan sasaran strategis organisasi, serta tantangan dan peluang yang ada. Kami percaya bahwa dengan kerja sama dan komitmen dari seluruh tim aparatur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan, kita dapat mencapai kesuksesan dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Semoga dengan tersusunnya dokumen ini tujuan dan sasaran pembangunan bidang urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan urusan bidang Pembinaan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk dapat berhasil dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan.

Kuala Pembuang, Juli 2025


Kepala Dinas P3AP2KB
Kabupaten Seruyan,
JUNAIDI, S.I.P.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19670712 198911 1 00